Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN: 2797-9407, e-ISSN: 2797-9423
Volume 6, nomor 4, 2026, hal. 2890-2899
Doi: https://doi.org/10.53299/ba-jpm.v6i4.5643

Penguatan Literasi Bahasa Indonesia Formal bagi Perangkat Desa se-Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk Mendukung Pelayanan Publik

Sri Nur Yuliyawati, Hazma, Muhammad Syaiful Nurasman*, Tedy Heriyadi, Muhamad Arif Nugraha, Satria Kharimul Qolbi, Dinda Amanda Ainun Nuzul, Yedi Wiguna
Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: m.syaiful.n@polban.ac.id
Dikirim: 02-10-2026; Direvisi: 23-10-2026; Diterima: 30-10-2026

Abstrak: Penguatan literasi bahasa Indonesia formal bagi perangkat desa se-Kecamatan Lembang merupakan kebutuhan prioritas guna mendukung penyusunan dokumen kedinasan dan komunikasi pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam menggunakan bahasa Indonesia formal melalui pendekatan partisipatif berbasis pendampingan. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 30 peserta dari 15 desa, mencakup pelatihan bahasa formal dan praktik penyusunan dokumen autentik, dilengkapi dengan pengenalan teknologi *voice-to-text*. Evaluasi menggunakan instrumen terpadu berupa *pretest–posttest* yang terdiri atas soal pilihan ganda dan tugas menulis surat dinas. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 86,29 menjadi 93,24 ($t = 5{,}736$; $p < 0{,}001$; Cohen's $d_z = 1{,}252$). Dari 21 peserta dengan data *pretest–posttest* lengkap, sebanyak 18 peserta (85,71%) mengalami peningkatan skor. Dari 23 peserta yang mengisi kuesioner, rata-rata kepuasan mencapai 4,63 dari 5. Pendekatan yang mengintegrasikan materi kebahasaan, dokumen autentik, dan teknologi digital berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi literasi bahasa Indonesia formal peserta pelatihan.

Kata Kunci: literasi bahasa Indonesia formal; pelatihan; pelayanan publik; pengabdian kepada masyarakat; perangkat desa.

Abstract: Strengthening formal Indonesian literacy among village officials across Lembang District is a priority for improving official document preparation and public service communication. This community service program aimed to enhance village officials' competence in using formal Indonesian through a participatory mentoring approach. The two-day training was attended by 30 participants from 15 villages and included formal language instruction, authentic document-writing practice, supplemented by an introduction to *voice-to-text* technology. Evaluation employed an integrated *pretest–posttest* instrument comprising multiple-choice items and an official letter-writing task. Results indicated a significant increase in average scores from 86.29 to 93.24 ($t = 5.736$; $p < 0.001$; Cohen's $d_z = 1.252$), with 18 of 21 paired-data participants (85.71%) showing improvement. A satisfaction survey completed by 23 of 30 participants yielded a Very Good rating (4.63/5). The integrated approach combining linguistic materials, authentic documents, and digital technology contributed to the improvement of participants' formal Indonesian literacy competence.

Keywords: community service; formal Indonesian literacy; public service; training; village officials.

PENDAHULUAN

Sebagai garda terdepan pelayanan publik, institusi tingkat desa menuntut aparaturnya memiliki kompetensi berbahasa Indonesia formal, lisan dan tulis, dalam

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

menjalankan fungsi kedinasan. Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab pokok instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya (Marlaili, 2023). Ketika kompetensi kebahasaan perangkat desa belum sepenuhnya memadai, kinerja birokrasi desa rentan terkendala oleh kesalahan sintaksis, kerancuan istilah, dan ketidaktepatan diksi dalam dokumen dinas. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas pemahaman dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap perangkat desa.

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tersebut. Kecamatan ini membawahkan 16 desa dengan struktur administratif yang mencakup 227 RW dan 884 RT yang melayani sekitar 59.446 kepala keluarga, dengan total populasi 194.374 jiwa, mayoritas berusia produktif 25–49 tahun. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian paling timur Kabupaten Bandung Barat sekaligus menjadi kawasan wisata utama Jawa Barat dengan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pariwisata, pertanian sayur, peternakan sapi perah, dan UMKM. Dari sisi sumber daya manusia, aparatur pemerintah desa di wilayah ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi (Setiawan dkk., 2023), sebuah modal yang idealnya mendukung kompetensi kebahasaan formal dalam pelayanan administratif.

Namun demikian, telaah data sekunder, wawancara nonformal dengan aparat kecamatan, serta analisis awal terhadap enam dokumen administrasi desa menunjukkan bahwa keenam dokumen tersebut masih memuat ketidaktepatan kebahasaan dan ketidakseragaman format administrasi. Sebagai contoh, pada salah satu surat undangan resmi Pemerintah Desa Lembang ditemukan penggunaan frasa pembuka yang kurang lazim dalam ragam kedinasan, kalimat penutup yang belum efektif, serta ketidakkonsistenan teknis pada bagian tembusan surat. Temuan ini sejalan dengan tantangan umum pelayanan publik di Bandung Barat, yaitu komunikasi yang masih didominasi satu arah dari desa ke masyarakat, forum musyawarah yang cenderung formalitas, standar layanan yang belum merata, serta ketiadaan SOP yang jelas pada tingkat desa (Purwana & Sinurat, 2024). Praktik duplikasi surat lama tanpa penyuntingan turut memperbesar risiko kesalahan kaidah kebahasaan, mulai dari diksi, penggunaan huruf kapital, tanda baca, hingga ragam baku (Astuti dkk., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Camat beserta jajaran Kecamatan Lembang, kebutuhan penguatan literasi bahasa Indonesia formal mengemuka sebagai permasalahan prioritas. Salah satu manifestasi konkretnya adalah belum optimalnya pelaporan data kependudukan lahir, mati, pindah, dan datang (LAMPID); selama ini hanya satu dari 16 desa yang rutin melaporkannya. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahan penyaluran bantuan sosial. Sebagai contoh, warga yang telah meninggal dunia dapat tetap tercatat sebagai penerima bantuan sehingga memicu protes masyarakat maupun teguran dari pemerintah kabupaten kepada perangkat kecamatan. Hasil FGD mengindikasikan adanya kesenjangan antara praktik komunikasi sehari-hari perangkat desa dan tuntutan bahasa administratif dalam penyusunan data serta dokumen kedinasan. Dalam perspektif sosiolinguistik, kesenjangan ini merupakan bentuk ketidaksesuaian register (Holmes, 2013). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

kemampuan perangkat desa dalam mengalihkan informasi lisan ke dalam bentuk tertulis yang baku dan terstruktur (Ong, 2002).

Kerangka regulasi terbaru turut menegaskan pentingnya kompetensi ini. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa mensyaratkan perangkat desa memenuhi kriteria administratif dan pendidikan minimal SMA/sederajat, sementara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri mengarahkan pengembangan kompetensi aparatur desa pada tiga ranah, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, termasuk kemampuan berkomunikasi dan memfasilitasi musyawarah desa (BPSDM Kementerian Dalam Negeri, 2026). Bertolak dari kondisi dan kerangka regulasi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kompetensi perangkat desa se-Kecamatan Lembang dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah dan konteks komunikasi kedinasan. Secara spesifik, tujuan kegiatan mencakup tiga aspek: (1) penguatan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia formal dalam komunikasi pelayanan publik; (2) peningkatan keterampilan menyusun dan menyunting dokumen administrasi sesuai kaidah kebahasaan dan format kedinasan; serta (3) pemanfaatan teknologi digital sebagai alat bantu penyusunan dokumen administratif.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pendampingan, yang menekankan diagnosis kebutuhan bersama mitra, perancangan solusi secara kolaboratif, praktik langsung, dan evaluasi. Dalam konteks kegiatan ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek, sementara tim pelaksana berperan sebagai fasilitator. Sasaran kegiatan adalah perangkat desa dari 16 desa di Kecamatan Lembang, dengan target dua perangkat dari masing-masing desa yang bertugas di bidang administrasi dan penyusunan dokumen sehingga jumlah peserta yang ditargetkan adalah 32 orang.

Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam tiga fase. Fase pertama (persiapan) diawali dengan identifikasi masalah melalui survei dan wawancara dengan mitra, dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Camat dan jajaran Kecamatan Lembang untuk mengonfirmasi temuan awal, menyamakan persepsi mengenai kendala literasi administrasi dan pelaporan LAMPID, serta menentukan kebutuhan instrumen prioritas mitra. Hasil FGD menjadi dasar penyusunan materi, templat naratif, panduan pemanfaatan fitur *voice-to-text*, dan mekanisme pendampingan. Pada tahap ini pula dilakukan koordinasi tim serta perumusan solusi berupa penyusunan buku pedoman berjudul "Cakap Berbahasa Indonesia Formal: Panduan Praktis bagi Perangkat Desa" dalam bentuk cetak dan digital (*e-book*), yang diterbitkan atas kerja sama Elementa Media Literasi dengan Polban, disertai templat/format surat dinas digital, sebelum modul pelatihan disusun.

Fase kedua (pelaksanaan pelatihan) dilaksanakan selama dua hari, yaitu Rabu–Kamis, 26–27 Agustus 2026, bertempat di Aula Kecamatan Lembang, melalui tiga kegiatan utama. Pertama, pelatihan intensif yang mencakup kebijakan berbahasa berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, komunikasi santun dalam pelayanan publik, komunikasi dalam forum dan penjelasan regulasi, tata naskah dinas baku sesuai Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi Kelima (EYD V), serta bahasa dalam media massa dan pelaporan kegiatan. Kedua, klinik literasi

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

berupa pendampingan langsung (*coaching*) terhadap draf dokumen autentik yang sedang disusun perangkat desa. Ketiga, evaluasi *pretest–posttest* menggunakan instrumen terpadu yang terdiri atas 18 soal pilihan ganda dan menjodohkan untuk mengukur pengetahuan kebahasaan serta satu tugas menulis surat dinas yang dinilai dengan rubrik tiga aspek (kesesuaian isi, register bahasa formal, dan kejelasan kalimat) untuk mengevaluasi keterampilan penyusunan dokumen. Skor total dikonversi ke dalam skala 100. Pada sesi implementasi teknologi, peserta memperoleh praktik teknis penggunaan fitur *voice-to-text* pada gawai masing-masing untuk merekam atau mendiktekan informasi administrasi secara terstruktur, menyalin hasil transkripsi ke dalam templat dokumen, dan menyuntingnya berdasarkan daftar periksa kebahasaan dan kelengkapan data. Keberhasilan sesi ini diukur dari kemampuan peserta menghasilkan satu draf dokumen administrasi berbasis hasil transkripsi yang telah disunting sesuai format dan ragam bahasa kedinasan. Pendekatan ini penting karena efektivitas pelayanan publik perangkat desa turut dipengaruhi oleh faktor komunikasi (Willudjeng dkk., 2024) sehingga peningkatan kompetensi literasi pada tataran administrasi, informasi, dan komunikasi menjadi kebutuhan mendasar bagi perangkat desa (Suprapti dkk., 2017).

Mitra berkontribusi langsung dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan secara *in-kind*, yaitu izin dan fasilitas Aula Kecamatan Lembang beserta perlengkapannya sebagai lokasi FGD maupun pelatihan, bantuan aktif mengoordinasikan keterlibatan perangkat dari 16 desa melalui surat resmi dan tembusan kepada masing-masing kepala desa, serta pendampingan proses administratif perizinan kegiatan.

Fase ketiga (evaluasi dan keberlanjutan) difokuskan pada analisis hasil evaluasi, pemantauan penerapan pascakegiatan, dan penguatan keberlanjutan program. Keberlanjutan program dirancang melalui penunjukan beberapa peserta aktif sebagai penggerak literasi desa yang bertugas membantu rekan kerja menerapkan templat, panduan, dan sistem penyimpanan dokumen digital. Pemantauan berkala dilakukan melalui komunikasi daring antara tim pelaksana dan narahubung kecamatan. Program lanjutan yang direncanakan setelah kegiatan ini adalah pelatihan literasi bagi pengelola kegiatan tingkat masyarakat, seperti posyandu dan karang taruna, mengingat literasi desa melampaui kemampuan baca-tulis dan berfungsi memberdayakan masyarakat desa dalam mengakses informasi yang mendukung kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan yang produktif dan berkelanjutan (Prayitno, 2024; Praseptiawan dkk., 2021). Luaran kegiatan berupa buku panduan praktis, templat surat dinas digital, dan dokumen hasil praktik peserta. Keberhasilan kegiatan diukur melalui dua indikator utama, yaitu peningkatan skor rata-rata *posttest* dibandingkan *pretest* serta peningkatan kualitas dokumen administrasi yang dinilai berdasarkan rubrik ketepatan kebahasaan, kesesuaian format, dan keterbacaan.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam dua hari, yaitu Rabu–Kamis, 26–27 Agustus 2026, bertempat di Aula Kecamatan Lembang. Kegiatan diikuti oleh 30 perangkat desa yang merepresentasikan 15 dari 16 desa di Kecamatan Lembang (Desa Pagerwangi tidak mengirimkan perwakilan). Hari pertama mencakup

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

pembukaan resmi oleh Camat Lembang, penyampaian materi kebijakan berbahasa, pelaksanaan *pretest*, serta materi komunikasi santun dalam pelayanan publik dan komunikasi dalam forum. Hari kedua difokuskan pada materi bahasa baku dalam surat dinas, bahasa dalam media massa dan laporan kegiatan, praktik penggunaan templat digital dan fitur *voice-to-text*, serta pelaksanaan *posttest*. Materi pelatihan disampaikan oleh delapan dosen dari Politeknik Negeri Bandung dengan metode ceramah interaktif, diskusi studi kasus, dan praktik langsung pada dokumen autentik milik peserta. Rincian materi pelatihan disajikan pada Tabel 1, sementara suasana pelaksanaan pelatihan hari pertama dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Materi pelatihan

No.	Materi	Narasumber
1	Kebijakan berbahasa: UU No. 24 Tahun 2009	Sri Nur Yuliyawati
2	Berbahasa santun dalam pelayanan publik	Hazma
3	Berbahasa komunikatif dalam forum dan penjelasan regulasi	M. Syaiful Nurasman
4	Berbahasa baku dalam struktur surat dinas	Hazma
5	Berbahasa efektif dalam perencanaan dan laporan kegiatan	Tedy Heriyadi
6	Berbahasa lugas dalam media sosial	M. Syaiful Nurasman
7	Praktik penyusunan surat dinas dan penggunaan templat digital	Tedy Heriyadi
8	Pemanfaatan fitur *voice-to-text*	Yedi Wiguna



Gambar 1. Pelaksanaan pelatihan perangkat desa di Aula Kecamatan Lembang

Hasil Evaluasi Pengetahuan dan Keterampilan

Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen terpadu yang terdiri atas dua komponen: (1) 18 soal pilihan ganda dan menjodohkan (skor maksimal 21 poin; bobot 63,6%) serta (2) satu tugas menulis surat dinas yang dinilai dengan rubrik tiga aspek (kesesuaian isi, register bahasa formal, kejelasan kalimat dan ejaan; skor maksimal 12 poin; bobot 36,4%). Total skor mentah 33 poin dikonversi ke skala 100. Validitas instrumen didasarkan pada kesesuaian isi (*content validity*) dengan materi pelatihan yang disusun oleh tim dosen pelaksana. Rubrik menulis dinilai oleh satu orang fasilitator berdasarkan penilaian kualitatif; ketiadaan penilai kedua merupakan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasi skor komponen menulis. Dari 30 peserta, 21 orang memiliki data *pretest* dan *posttest* yang lengkap. Sembilan peserta tidak memiliki data berpasangan: seluruh sembilan orang tidak mengikuti *pretest* (lima di antaranya baru hadir pada hari kedua, sedangkan empat lainnya terlambat hadir pada hari pertama sehingga melewatkan sesi *pretest*). Tidak

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

ada peserta yang hanya mengikuti *pretest* tanpa *posttest*. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik deskriptif skor *pretest* dan *posttest* (n = 21)

Statistik	*Pretest*	*Posttest*
Rata-rata	86,29	93,24
Median	87,00	96,00
Simpangan baku	6,37	7,07
Minimum	70	79
Maksimum	94	100

Rata-rata skor *pretest* adalah 86,29 (SD = 6,37), sementara rata-rata skor *posttest* meningkat menjadi 93,24 (SD = 7,07), dengan selisih rata-rata sebesar 6,95 poin atau peningkatan relatif sebesar 8,06%. Dari 21 peserta dengan data lengkap, 18 orang (85,71%) mengalami peningkatan skor, 2 orang (9,52%) memperoleh skor tetap, dan 1 orang (4,76%) mengalami penurunan skor.

Sebelum uji inferensial, normalitas distribusi selisih skor diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil menunjukkan W = 0,965, p = 0,617 (p > 0,05) sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan uji t berpasangan dapat digunakan. Hasil uji t berpasangan menunjukkan nilai t(20) = 5,736 dengan p < 0,001, yang mengindikasikan bahwa perbedaan skor *pretest* dan *posttest* signifikan secara statistik. Nilai Cohen's d_z sebesar 1,252 menunjukkan efek besar (*large effect*) pada peningkatan kompetensi peserta.

Mengingat skor *pretest* yang sudah tinggi (rata-rata 86,29), *normalized gain* kelas dihitung sebesar g = 0,51, yang berarti peserta menutup sekitar 51% dari ruang peningkatan yang tersedia. Menurut klasifikasi Hake (1998), nilai ini tergolong kategori sedang ($0,3 \leq g < 0,7$).

Respons Peserta

Evaluasi kepuasan dilakukan melalui kuesioner dengan skala 1–5 yang diisi oleh 23 dari 30 peserta (76,67%). Hasil evaluasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil evaluasi kepuasan peserta

No.	Aspek yang Dievaluasi	Rata-rata	Persentase	Kategori
1	Materi pelatihan	4,67	93,48%	Sangat Baik
2	Metode pelatihan	4,63	92,61%	Sangat Baik
3	Sarana, prasarana, dan fasilitas	4,54	90,87%	Sangat Baik
4	Kepuasan peserta dan kinerja narasumber	4,61	92,17%	Sangat Baik
5	Kebermanfaatan dan penerapan hasil	4,70	93,91%	Sangat Baik
	Rata-rata keseluruhan	**4,63**	**92,61%**	**Sangat Baik**

Aspek kebermanfaatan dan penerapan hasil memperoleh skor tertinggi (4,70), yang mengindikasikan bahwa peserta menilai materi pelatihan relevan dan dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari di kantor desa. Aspek sarana dan prasarana memperoleh skor terendah (4,54), yang kemungkinan berkaitan dengan keterbatasan jaringan internet saat sesi praktik digital.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Kendala dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat tiga kendala utama. Pertama, koordinasi jadwal peserta menjadi tantangan karena beberapa perangkat desa mengalami pergantian jadwal tugas sehingga tidak semua peserta dapat mengikuti kegiatan secara penuh selama dua hari. Kendala ini diatasi melalui koordinasi intensif dengan Kecamatan Lembang dan komunikasi melalui grup pesan. Kedua, akses jaringan internet di lokasi pelatihan belum sepenuhnya stabil sehingga menghambat sesi praktik penggunaan templat digital dan *voice-to-text*. Solusi yang ditempuh adalah menyiapkan materi dalam format luring dan memberikan pendampingan langsung selama praktik. Ketiga, variasi kemampuan teknologi informasi peserta cukup lebar sehingga beberapa peserta memerlukan waktu lebih lama untuk mengikuti sesi praktik digital. Pendampingan bertahap dengan contoh sederhana diterapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kompetensi peserta pelatihan meningkat secara signifikan setelah mengikuti kegiatan. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Astuti dkk. (2021) yang melaporkan bahwa pelatihan penulisan surat dinas mampu meningkatkan kemampuan kebahasaan perangkat desa. Willudjeng dkk. (2024) turut menegaskan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci efektivitas pelayanan publik perangkat desa. Widodo dan Fatimah (2018) juga menemukan bahwa literasi bahasa Indonesia formal merupakan kompetensi esensial bagi aparatur pemerintah desa, sementara Arifi dan Rahmad (2019) melaporkan bahwa pelatihan keterampilan menulis formal mampu meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan aparat pemerintah.

Skor *pretest* yang relatif tinggi (rata-rata 86,29) menimbulkan efek langit-langit (*ceiling effect*) yang membatasi ruang peningkatan hanya sebesar 13,71 poin. Meskipun demikian, *normalized gain* sebesar 0,51 menunjukkan peserta berhasil menutup sekitar separuh dari ruang peningkatan tersebut, yang tergolong kategori sedang. Skor awal yang tinggi perlu dimaknai secara kontekstual. Pertama, perangkat desa di Kecamatan Lembang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi (Setiawan dkk., 2023). Kedua, terdapat kemungkinan bias seleksi (Creswell, 2014): perangkat desa yang bersedia menghadiri pelatihan cenderung yang sudah memiliki kompetensi dan motivasi lebih tinggi dibandingkan rekan-rekannya. Meskipun demikian, peningkatan sebesar 8,06% dari baseline yang sudah tinggi tetap bermakna secara praktis, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Cohen's d_z = 1,252 yang tergolong efek besar. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak sekadar mengulangi pengetahuan yang sudah dimiliki, melainkan mampu menajamkan kompetensi kebahasaan peserta pada aspek-aspek spesifik yang selama ini belum dikuasai secara optimal.

Secara kebahasaan, peningkatan tersebut dapat dipahami dari perspektif kesenjangan register. Perangkat desa yang terbiasa berkomunikasi dalam register informal keseharian menghadapi tuntutan untuk beralih ke register formal kedinasan saat menyusun dokumen dan melayani masyarakat (Holmes, 2013). Pelatihan berbasis dokumen autentik yang diterapkan dalam kegiatan ini memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan peralihan register tersebut pada konteks kerja nyata, bukan sekadar mempelajari kaidah secara teoretis.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Satu peserta yang mengalami penurunan skor dan dua peserta yang skornya tetap menunjukkan bahwa dampak pelatihan tidak seragam. Variasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat konsentrasi, kelelahan pada hari kedua saat *posttest* dilaksanakan, atau keterbatasan daya serap materi dalam waktu pelatihan yang relatif singkat. Faktor-faktor tersebut tidak diukur secara langsung dalam kegiatan ini. Keterbatasan waktu ini juga menjadi catatan penting: jarak antara *pretest* dan *posttest* yang hanya satu hari belum memungkinkan pengukuran retensi pengetahuan jangka panjang. Evaluasi lanjutan pascakegiatan diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan kompetensi yang tercatat bersifat berkelanjutan.

Keterbatasan lain yang perlu diakui adalah tidak adanya kelompok kontrol, sehingga peningkatan skor tidak dapat sepenuhnya diatribusikan kepada pelatihan semata. Evaluasi juga terbatas pada instrumen tes; perbandingan kualitas dokumen administratif sebelum dan sesudah pelatihan belum dilakukan secara formal. Selain itu, dari 30 peserta yang terdaftar, hanya 21 yang memiliki data *pretest* dan *posttest* lengkap (70%). Seluruh sembilan peserta yang tidak berpasangan tidak mengikuti *pretest*, bukan *posttest*. Perbandingan skor *posttest* menunjukkan bahwa kelompok berpasangan (M = 93,24) memperoleh skor lebih tinggi secara signifikan daripada kelompok tidak berpasangan (M = 81,67; U = 151, p = 0,010), yang mengindikasikan kemungkinan bias seleksi pada sampel yang dianalisis. Terlepas dari keterbatasan tersebut, kombinasi peningkatan signifikan secara statistik, efek besar, dan respons peserta yang sangat positif menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis pendampingan yang mengintegrasikan materi kebahasaan, dokumen autentik, dan teknologi digital berkontribusi positif terhadap penguatan literasi bahasa Indonesia formal peserta pelatihan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan literasi bahasa Indonesia formal bagi perangkat desa se-Kecamatan Lembang telah dilaksanakan selama dua hari dengan diikuti oleh 30 peserta dari 15 desa. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan tiga hal berikut. Pertama, kompetensi kebahasaan peserta meningkat secara signifikan setelah pelatihan, dengan rata-rata skor naik dari 86,29 menjadi 93,24 ($t = 5{,}736$; $p < 0{,}001$; Cohen's $d_z = 1{,}252$). Kedua, pendekatan partisipatif berbasis pendampingan yang mengintegrasikan materi kebahasaan, praktik pada dokumen autentik, serta pengenalan teknologi *voice-to-text* berkontribusi positif sebagai strategi penguatan literasi bahasa Indonesia formal perangkat desa dalam konteks kegiatan ini. Ketiga, respons peserta terhadap kegiatan sangat positif (skor kepuasan 4,63/5), terutama pada aspek kebermanfaatan dan penerapan hasil pelatihan.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan berupa jarak waktu *pretest–posttest* yang singkat, tidak adanya kelompok kontrol, serta ketidaklengkapan data berpasangan pada sebagian peserta. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang dilengkapi dengan evaluasi lanjutan pascakegiatan untuk mengukur retensi pengetahuan dan perubahan perilaku kerja perangkat desa dalam jangka panjang. Program pendampingan berkelanjutan melalui peserta penggerak di masing-masing desa juga perlu dipantau efektivitasnya sebagai mekanisme keberlanjutan program.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bandung yang telah mendanai kegiatan ini melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Tahun 2026, Camat Lembang beserta jajaran Kecamatan Lembang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta seluruh perangkat desa peserta pelatihan yang telah berpartisipasi secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Arifi, Z., & Rahmad, D. (2019). Efektivitas pelatihan keterampilan menulis formal bagi aparat pemerintah. *Jurnal Komunikasi Sosial, 4*(3), 112–128.

Astuti, T., Dewi, R., & Muslihah, N. N. (2021). Pelatihan penulisan surat dinas pada perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian pada Masyarakat, 4*(1), 1–13. https://doi.org/10.31540/jpm.v4i1.1288

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BPSDM Kementerian Dalam Negeri. (2026, 7 April). *Kemendagri gelar sejumlah diklat teknis dan fungsional untuk peningkatan kompetensi aparatur*. Kemendagri. https://bpsdm.kemendagri.go.id/newsdetail/907

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics, 66*(1), 64–74.

Holmes, J. (2013). *An introduction to sociolinguistics* (4th ed.). Routledge.

Marlaili, R. (2023). Analisis kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi di kantor Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak, 4*(1), 938–948.

Ong, W. J. (2002). *Orality and literacy*. Routledge.

Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., & Iqbal, A. (2021). Pelatihan sistem informasi desa untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perangkat Desa Taman Sari. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 521–528. https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1206

Prayitno, A. (2024). Urgensi program gerakan literasi desa di Indonesia. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8*(1).

Purwana, B. H., & Sinurat, H. P. (2024). Membangun kelembagaan dan pengembangan kompetensi perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0*.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55.

Setiawan, A., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2023). Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa dengan status desa mandiri dan desa berkembang (studi kasus: Desa Lembang dan Desa Cimerang Kabupaten Bandung Barat). *Repositori UNJANI*. https://fisip.unjani.ac.id/repository/

Suparti, S., Amilia, F., & Hayati, K. (2017). Optimalisasi Kompotensi Literasi Bagi Aparat Desa Guna Menuju Desa Mandiri Yang Berwirausaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, *3*(2).

Widodo, A., & Fatimah, S. (2018). Literasi bahasa Indonesia untuk aparatur pemerintah desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 3*(1), 78–92.

Willudjeng, F. A., Maharani, W. M., & Guntarayana, I. (2024). Komunikasi aparatur desa terhadap peningkatan pelayanan publik di desa se-Kecamatan Kesamben Blitar. *Jurnal Media Akademik, 2*(1).

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional